

Policy Brief

ESKALASI REALISASI INVESTASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Policy Brief ini ditulis oleh :

Mulyani Puji Lestari – Pemkab Musi Rawas

Oktaviany – Pemprov Kepulauan Bangka Belitung

Policy Brief ini ditujukan :

Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Executive Summary

Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaan investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rendahnya realisasi investasi baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, membatasi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dan ini dapat menghambat pengembangan sektor ekonomi dan mengurangi daya saing daerah di tingkat nasional. Hasil analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi di Provinsi Bangka Belitung salah satunya adalah rendahnya kesadaran investor melaporkan kegiatan penanaman modal. Alternatif kebijakan strategis yang akan mampu meningkatkan kesadaran investor/pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut :

Alternatif 1 : Memberikan pelatihan dan workshop secara berkala kepada investor/pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Alternatif 2 : Memanfaatkan teknologi dan inovasi, seperti platform digital dan aplikasi *mobile*, untuk menyediakan akses mudah dan informasi yang mudah dipahami tentang kegiatan pelaporan penanaman modal kepada investor

Alternatif 3 : Memberikan reward kepada investor/pelaku usaha yang mematuhi aturan pelaporan kegiatan penanaman modal dan memperketat sanksi terhadap pelanggaran pelaporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku

Rekomendasi :

Berdasarkan matriks analisis dengan menggunakan empat variabel yaitu keberterimaan, efektivitas, aksesibilitas dan *legal suitability*, maka kebijakan yang direkomendasikan adalah "**Memberikan reward kepada investor/pelaku usaha yang mematuhi aturan pelaporan kegiatan penanaman modal dan memperketat sanksi terhadap pelanggaran pelaporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku**".

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun beberapa prioritas pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah, Pembangunan SDM. Sasaran Pembangunan ekonomi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah.

Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaan investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi ekonomi yang berkelanjutan. Investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan sektor produksi untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi (Bappenas, 2007). Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berinvestasi, yang diantara perwujudannya adalah adanya sistem perizinan yang sederhana, jelas, dan transparan serta adanya adanya regulasi yang mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi.

Walaupun kebijakan ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya investasi, akan tetapi implementasi dilapangan menemui berbagai kendala, yang mengakibatkan realisasi target investasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak tercapai.

Tabel 1. Realisasi Investasi berdasarkan PMA dan PMDN Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Realisasi Per-Tahun (Rp. Juta)			Target Nasional
	PMA	PMDN	Realisasi	
2019	1.330,9	2.915,1	4.346	6,850
2020	697,4	1.863,7	2.561	5,100
2021	653,0	3.677,3	4.330	4,500
2022	1.861,2	5.308,9	8.170	6,760
2023	1.072,2	7.961,4	9.033	21,260

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

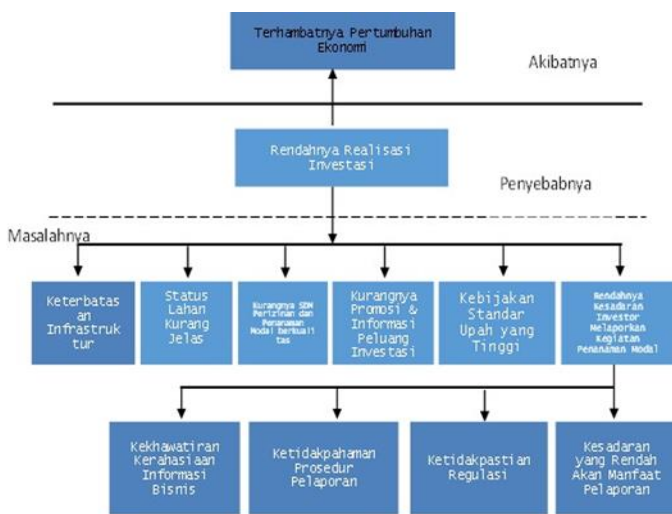
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak sangat dinamis. Dimana realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fluktuatif dan bergerak naik namun masih dibawah target investasi yang telah ditetapkan pemerintah, seperti yang dikatakan Darlan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa "Target 2023 oleh BKPM RI Rp. 21 Trilyun jadi tercapai 42 Persen" ([RRI.co.id](https://rri.co.id) - [Nilai Investasi Tahun 2023 di Babel Rp9,033 Triliun, 7 Februari 2024](https://rri.co.id)). Sehingga rendahnya realisasi investasi baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, membatasi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dan ini dapat menghambat pengembangan sektor ekonomi dan mengurangi daya saing daerah di tingkat nasional.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023), perkembangan realisasi investasi selama 2019-2023 sebanyak 1170 proyek dengan nilai investasi PMDN Rp. 7.961,4 Juta dan 207 proyek dengan nilai investasi PMA Rp. 1.072,2 juta. 5 (Lima) besar bidang usaha yang banyak diminati dalam investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah yang pertama pertambangan yaitu Rp. 1.952,7 Trilyun, yang kedua industry Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Rp. 1.851,7 Trilyun, ketiga Industri makanan Rp. 1.328,5 Trilyun, keempat Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan Rp. 962 Milyar serta kelima adalah Perdagangan dan reparasi 879 Milyar. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan strategi atau arahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan memandu kegiatan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Umum Penanaman Modal ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi pengambilan keputusan investasi, pengembangan kebijakan, dan implementasi

program-program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah kendala dalam mendukung realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan menggunakan pendekatan analisis pohon masalah (*problem tree*) akan dilakukan identifikasi masalah dari berbagai kendala yang dialami oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai realisasi investasi yang telah ditetapkan Pemerintah, sebagai berikut:



Gambar 1. Pohon Masalah (Problem Tree)

Dari analisis Pohon Masalah (*Problem Tree*) penyebab rendahnya realisasi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Keterbatasan infrastruktur

Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 menyatakan bahwa masih kurangnya infrastruktur sebagai pendukung utama dari investasi antara lain pelabuhan yang representatif, sarana angkut dan pengumpulan sampah, jalan yang rusak atau tidak memadai, listrik yang tidak stabil, atau akses air bersih yang terbatas, dapat menghambat aksesibilitas ke lokasi investasi. Sehingga biaya operasional akan semakin tinggi, dan mengganggu operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial.

2. Status Lahan Kurang Jelas

Terutama terkendala masalah sertifikasi, zonasi lahan, serta informasi harga lahan di kab/kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak pasti.

3. Kurangnya SDM Perizinan dan Penanaman Modal yang berkualitas

Data kepegawaian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, SDM pengelola perizinan dan penanaman modal belum semuanya mengikuti diklat teknis perizinan dan penanaman modal, sehingga sangat mempengaruhi dalam memberikan pelayanan.

4. Kurangnya promosi dan informasi Peluang Investasi

Kurangnya anggaran atau sumber daya manusia yang tersedia untuk kegiatan promosi dan penyusunan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor dapat menjadi hambatan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menarik investor menanamkan modalnya.

5. Kebijakan Standar Upah yang Tinggi

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada urutan ketiga UMP tertinggi Se-Indonesia yaitu sebesar Rp. 3.498.479,-/bulan setelah Jakarta dan Papua. Kebijakan standar upah tenaga kerja yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain menjadikan pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya karena dengan upah yang tinggi akan mempengaruhi besarnya biaya tenaga kerja yang akan dikeluarkan.

6. Rendahnya Kesadaran Investor Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal

Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan dari 9.519 investasi yang harusnya melaporkan LKPM, hanya 20,77% yang melaporkan. Hal ini disebabkan karena:

a. Kekhawatiran Kerahasiaan Informasi Bisnis

Investor/pelaku usaha khawatir jika melaporkan semua realisasi belanja modalnya biasanya terkait dengan resiko

b. Ketidapkahaman prosedur pelaporan

Investor/pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modal pada aplikasi OSS Kementerian Investasi/BKPM sebagian dikarenakan ketidakpahaman prosedur pelaporan kegiatan penanaman modal.

c. Ketidakpastian Regulasi

Regulasi perizinan yang kompleks dan prosedur perizinan yang panjang menghambat proses investasi dan memperpanjang waktu pelaksanaan proyek dan juga dapat meningkatkan biaya investasi dan mengurangi daya tarik suatu wilayah bagi investor.

d. Kesadaran yang rendah akan manfaat pelaporan

Melaporkan kegiatan penanaman modalnya investor dapat mengkomunikasikan permasalahan, kendala ataupun progress investasinya kepada pemangku kebijakan melalui LKPM, manfaat ini yang kurang disadari investor/pelaku usaha.

Rendahnya realisasi investasi baik PMDN maupun PMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak mencapai target realisasi investasi yang telah ditetapkan pemerintah dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini bahwa data laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019-2023 menunjukkan laju yang fluktuatif dan dibawah capaian laju pertumbuhan PDRB Nasional.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2023

Tahun	Kepulauan Bangka Belitung	Nasional
2019	3,32	5,02
2020	-2,29	-2,07
2021	5,05	3,70
2022	4,40	5,31
2023	4,38	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik

ALTERNATIF SOLUSI

Hasil analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi di Provinsi Bangka Belitung salah satunya adalah rendahnya kesadaran investor melaporkan kegiatan penanaman modal. Kurangnya laporan atau pelaporan yang tidak lengkap dapat menghambat kemampuan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk menilai kinerja mereka dalam menarik investasi. Tanpa data yang tepat, sulit bagi Pemerintah untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kelemahan dalam upaya mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, hasil dari hasil interview dengan pejabat dinas/instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal terdapat 3 alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yaitu : (1) Memberikan pelatihan dan workshop secara berkala kepada investor/pelaku usaha yang wajib laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), (2) Memanfaatkan teknologi dan inovasi, seperti platform digital dan aplikasi mobile, untuk menyediakan akses mudah dan informasi yang mudah dipahami tentang kegiatan pelaporan penanaman modal kepada investor, (3) Memberikan reward kepada investor/pelaku usaha yang mematuhi aturan pelaporan kegiatan penanaman modal dan memperketat sanksi terhadap pelanggaran pelaporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku (Tabel 3).

Alternatif	Keberterimaan	Efektivitas	Aksesibilitas	Legal Suitability	Total
	10%	50%	20%	20%	
1. Memberikan pelatihan dan workshop secara berkala kepada investor/pelaku usaha yang wajib laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	7 0.7	8 4	7 1.4	9 1.8	7.9
2. Memanfaatkan teknologi dan inovasi, seperti platform digital dan aplikasi mobile, untuk menyediakan akses mudah dan informasi yang mudah dipahami tentang kegiatan pelaporan penanaman modal kepada investor	8 0.8	8 4	7 1.4	8 1.6	7.8
3. Memberikan reward kepada investor/pelaku usaha yang mematuhi aturan pelaporan kegiatan penanaman modal dan memperketat sanksi terhadap pelanggaran pelaporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.	9 0.9	8 4	8 1.6	8 1.6	8.1
Skor : 1-10					

Kebijakan strategis yang akan mampu meningkatkan kesadaran investor/pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memberikan reward kepada investor/pelaku usaha yang mematuhi aturan pelaporan kegiatan penanaman modal berupa pemberian insentif baik pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah dan memperketat sanksi terhadap pelanggaran pelaporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku dengan memberikan peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal bahkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Implementasi konsep pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diuraikan sebagai rekomendasi sebagai berikut: (1) Menyusun Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Peraturan Pelaksanaan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi dimana dalam Peraturan Daerah tersebut belum disusun kriteria yang spesifik dan terukur untuk memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang mematuhi aturan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal yang baik yang memenuhi syarat untuk menerima reward dan bagi yang melanggar tidak melaporkan atau tidak sesuai ketentuan regulasi yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi (2) Menyusun surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka pemberian reward bagi yang patuh penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan sanksi bagi yang tidak patuh penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (3) Melakukan sosialisasi terhadap program reward dan sanksi yang telah ditetapkan melalui media informasi mudah diakses oleh masyarakat umum.

Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan dan memastikan transparansi dalam

kegiatan investasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

REKOMENDASI

Rendahnya realisasi investasi di Provinsi Bangka Belitung yang tidak mencapai target realisasi investasi pemerintah, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran investor melaporkan kegiatan penanaman modal. Kebijakan strategis yang akan mampu meningkatkan kesadaran investor/pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memberikan reward kepada investor/pelaku usaha yang mematuhi aturan pelaporan kegiatan penanaman modal dan memperketat sanksi terhadap pelanggaran pelaporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berinvestasi.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023.

Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung.

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/653/DISNAKER/2022 tentang Petapan Upah Minimum provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.